

## **Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kudeta Mesir 2013**

**Herry Wahyudi**

Pusat Studi Masyarakat ASEAN, Universitas Riau

Email: herrywahyudihi09@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini akan mengkaji standar ganda politik luar negeri Amerika Serikat terhadap kudeta di Mesir tahun 2013, mengingat bahwa intervensi AS terhadap kawasan Timur Tengah sangat dominan. Perhatian dan respon AS terlihat berbeda dalam menanggapi kasus kudeta di Mesir. AS seolah tidak membuat kasus ini sebagai prioritas walaupun kudeta tersebut berujung pada pelanggaran HAM dan demokrasi. Respon yang diperlihatkan oleh AS sangat berbeda jika dibandingkan dengan intervensi AS terhadap Irak dan Libya yang dinilai AS sendiri sebagai upaya penegakan HAM dan demokrasi di kawasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari tahu mengapa AS bersikap standar ganda dalam politik luar negerinya terkait dengan kudeta Mesir. Data akan ditelaah melalui metode kepustakaan. Keseluruhan data akan dikorelasikan dengan teori politik luar negeri model aktor rasional yang dapat memaparkan alasan AS untuk memilih sikap standar ganda dalam kudeta Mesir 2013 berdasarkan pemilihan dan pertimbangan untung-rugi atas tindakan yang telah diambil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikasi standar ganda yang diperlihatkan oleh AS terhadap kudeta Mesir dipengaruhi oleh kemenangan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai *political Islam* yang dapat mengganggu stabilitas dan kepentingan AS di Timur Tengah. Beberapa pilihan dan konsekuensi telah dipertimbangkan oleh AS dalam merespon kasus ini, termasuk ikut mengabaikan adanya pelanggaran demokrasi dan HAM dalam kasus tersebut walaupun hal tersebut bertentangan dengan landasan dan prinsip politik luar negeri AS. Indikasi lain yang mendukung standar ganda ialah respon sekutu AS di Timur Tengah, seperti: Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang menganggap IM sebagai ancaman bagi stabilitas dan kawasan Timur Tengah.

**Kata kunci:** standar ganda AS, politik luar negeri AS, kudeta Mesir, politik Islam, Ikhwanul Muslimin

### **Abstract**

*This research will examine the double standards of US foreign policy against the coup in Egypt in 2013, given that the US intervention against the Middle East region is very dominant. Attention and the US response be different in response to the case of the coup in Egypt. US seemed to not make this case as a priority despite the coup led to the violation of human rights and democracy. The response shown by the US is very different compared to the US intervention against Iraq and Libya are rated US itself as defending human rights and democracy in the region. The purpose of this research is to find out why the US double standards in its foreign policy related to the Egyptian coup. Data will be explored through literature method (library research). Overall the data will be correlated with foreign political theory of rational actor models that can explain the reason for choosing the attitude of the US double standard in a coup in Egypt in 2013 based on the selection and cost-benefit considerations on the measures taken. The results of this paper indicate that the indication of the double standards shown by the US to Egypt coup influenced by the victory of the Muslim Brotherhood (IM) as a political Islam that could interfere with the stability and US interests in the Middle East. Some of the options and the consequences have been considered by the US in response to the case, including participating ignoring their violations of democracy and human rights in the case even though it was contrary to the foundations and principles of US foreign policy. Another indication that support multiple standards is the response of US allies in the Middle East, such as Israel, Saudi Arabia and the United Arab Emirates who consider IM as a threat to the stability and the Middle East region.*

**Keywords:** US double standards, US foreign policy, coup Egypt, political Islam, Muslim Brotherhood

---

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dimulai pada suatu pengamatan tentang indikasi standar ganda yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dalam politik luar negerinya terkait demokratisasi, pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan, dan hak asasi manusia terhadap implikasi konflik politik dalam peristiwa *Arab Spring* (Pelletreau, 2018: 6). Standar ganda (*double standard*) merupakan perilaku kebijakan politik luar negeri suatu negara yang banyak diadopsi oleh negara-negara Barat dan merupakan fenomena yang sering dijalankan oleh negara-negara Barat. Perilaku standar ganda ini juga erat kaitannya dengan norma yang dianut oleh suatu negara dan dipaksakan untuk dianut terhadap negara lain. Standar ganda juga disebabkan oleh penggunaan norma yang universal terhadap beberapa isu yang dipisahkan. Standar ganda politik luar negeri AS bukan yang pertama kali dalam konstelasi politik global. Sebagai contoh, kasus Israel dan Palestina adalah kasus lama yang seakan dibiarkan karena berbagai faktor yang mengandung unsur politis.

Argumen peneliti yang menyematkan predikat standar ganda kepada AS berdasarkan pada pengamatan terhadap beberapa tindakan AS di dalam beberapa kasus *Arab Spring*. Libya adalah contoh negara *Arab Spring* yang telah diberlakukan *Responsibility to Protect* (RtoP) oleh Dewan Keamanan PBB yang dipelopori oleh Amerika Serikat karena adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penembakan para demonstran yang memprotes pemerintah.

Resolusi RtoP (Weiss, 2011: 3) yang dikeluarkan DK PBB berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokratisasi di daerah konflik melawan diktator. Resolusi RtoP melengserkan sang diktator Moammar Gaddafi yang tewas di tangan pasukan oposisi, dan hal inilah yang diklaim Amerika sebagai penegakan HAM dan demokrasi yang sesungguhnya. Korban tewas rakyat sipil yang diakibatkan oleh fenomena *Arab Spring*

mencapai angka ribuan orang (Karin Laub, 2014: 6). Tanggapan dari dunia internasional khususnya Liga Arab hanya terpaku pada mengecam pelanggaran HAM berat yang terjadi. Banyaknya korban tewas menjadi harga mati yang harus dibayar dalam mewujudkan reformasi dan demokratisasi di Timur Tengah.

Demokratisasi di Libya dinilai berhasil dalam menggulingkan rezim otoriter. RtoP menjadi manifestasi penegakan demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan di Libya. Namun, keberhasilan ini ternyata tidak berlaku di Mesir. Mesir bahkan tidak mendapat perhatian yang sama dengan apa yang terjadi di Libya walaupun dua negara ini memiliki kasus yang sama, yaitu kasus pelanggaran HAM berat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada tanggal 3 Juli 2013, Mesir yang sebelumnya telah meraih demokrasi hanya dalam setahun demokrasi tersebut direnggut oleh junta militer. Hal ini jika dipandang dari berbagai sudut merupakan penistaan terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Lebih parah lagi, implikasi dari kudeta militer ini berakibat pada jatuhnya ribuan korban penembakan oleh militer Mesir terhadap para demonstran pendukung Mursi. Kudeta dan konflik sipil di Mesir sebenarnya tidak lepas dari latar belakang sejarah yang terjadi di negara ini. Mesir memang dikenal sebagai negara yang sangat beresiko menghadapi konflik sipil dikarenakan perbedaan ideologi yang banyak mengakar di kalangan masyarakatnya. Pernyataan ini mendukung bahwa latar belakang sejarah dapat mendeskripsikan bahwa semua peristiwa politik internasional (kondisi di Mesir) itu merupakan kelanjutan (*continuity*), perubahan (*change*), dan pengulangan peristiwa-peristiwa sebelumnya (*circle*). Peristiwa kudeta Mesir merupakan peristiwa yang dilatarbelakangi oleh kelanjutan (*continuity*) dan pengulangan peristiwa-peristiwa sebelumnya (*circle*) (Setiawati, 2004: 27). Aspek kelanjutan

(*continuity*) dapat dilihat dari sejarah yang memperlihatkan bahwa Presiden Mesir sebelumnya, yakni Gamal Abdul Nasser, pernah melarang gerakan Ikhwanul Muslimin sehingga menimbulkan kerusuhan dan kelompok Islam, sedangkan aspek pengulangan (*circle*) dapat dilihat dari proses kudeta yang dilakukan oleh pihak militer di Mesir terhadap Presiden Mesir sebelumnya, Husni Mubarak, yang juga dialami oleh Presiden Mesir pada peristiwa ini, yaitu Muhammad Mursi.

Kudeta dimulai pada tanggal 1 Juli 2013. Penentang Mursi datang ke markas Ikhwanul Muslimin di Kairo dan mulai melakukan pelemparan jendela, menjarah gedung, serta melarikan perlengkapan kantor dan dokumen. Menteri Kesehatan dan Penduduk Mesir mengkonfirmasi kematian delapan orang pada bentrokan tersebut yang terjadi di Mokattam (AFP Bangkokpost, 2014: 1). Pada tanggal 3 Juli 2013, Menteri Kesehatan dan Penduduk mengumumkan bahwa 16 demonstran pendukung Mursi terbunuh dalam unjuk rasa di tempat lain (AFP Dawn, 2014: 1).

Situasi tersebut menyebabkan krisis konstitusi dan politik, dengan Mursi menolak tuntutan pihak militer. Angkatan Bersenjata Mesir mengancam akan mengambil alih bila politisi tidak mampu mengatasi situasi. Pada malam tanggal 3 Juli 2013, militer Mesir akhirnya menyatakan berakhirnya kepemimpinan Muhammad Mursi sebagai presiden. Pada pernyataan yang sama, militer mengumumkan bahwa konstitusi ditangguhkan, pemilihan presiden akan dilangsungkan segera, dan pimpinan mahkamah konstitusi Adly Mansour diangkat menjadi kepala pemerintahan. Pemerintah transisi akan dibentuk hingga dilangsungkan pemilihan umum (Wedeman, 2014: 1).

Kudeta militer dan penembakan demonstran yang terjadi telah mendapat perhatian dunia internasional khususnya negara-negara Arab lain di Timur Tengah. Namun, hal berbeda muncul dari sikap

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Arab Saudi serta Uni Emirat Arab.

Berdasarkan dokumen yang dipublikasikan oleh GCRP (*Global Centre for Responsibility to Protect*) terkait dengan *timeline* respon dan aksi kebijakan oleh para aktor-aktor kunci dalam kasus kudeta Mesir tahun 2013, terdapat perbedaan respon yang ditunjukkan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam perumusan politik luar negeri terkait dengan kudeta militer Mesir. Berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap Libya yang mengatasnamakan kemanusiaan, Amerika Serikat memelopori dilaksanakannya tindakan berupa RtoP di Libya. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa Amerika Serikat menerapkan standar ganda dalam politik luar negerinya terhadap kudeta Mesir tahun 2013.

## **Landasan Teori**

### *Model Aktor Rasional*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori politik luar negeri model aktor rasional (*rational actor*) yang menganalisis proses tentang pemilihan beberapa pilihan yang akan diambil oleh aktor pembuat kebijakan luar negeri. Pilihan tersebut dipilih berdasarkan beberapa konsekuensi yang telah dipertimbangkan. Misalnya, suatu negara lebih memilih kebijakan A-B dan B-C, tapi setelah melihat konsekuensi pilihan bisa jatuh pada A-C atau mungkin sebaliknya yakni C-A (Smith, 2008: 13). Teori ini menempatkan AS sebagai aktor rasional untuk memilih standar ganda sebagai arah politik luar negerinya dalam melihat kudeta Mesir 2013 atas dasar pilihan, tujuan, pertimbangan, serta konsekuensi yang akan diambil untuk menjaga stabilitas dan kepentingannya di kawasan Timur Tengah, khususnya Mesir.

**Tabel 1**

Telaah Pendekatan Model Aktor Rasional dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kudeta Mesir 2013

	A		
	Goals	Options	Consequences
Choices	Hegemoni di Timur Tengah	<i>Soft Power</i> (Intervensi Non-Militer, menawarkan perundingan sebagai pihak ketiga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehilangan fokus dalam menangani masalah Irak dan Suriah</li> <li>• Hubungan dengan negara sekutu</li> </ul>
	B		
	Goals	Options	Consequences
Choices	Hegemoni di Timur Tengah	<i>Responsibility to Protect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalaman buruk di Libya</li> <li>• Pergolakan gerakan Islam di Timur Tengah pasca <i>Arab Springs</i></li> <li>• Perubahan kebijakan keamanan dalam PLN AS di era Presiden Barrack Obama <i>"scrutinizing security"</i></li> </ul>
	C		
	Goals	Options	Consequences
Choices	Hegemoni di Timur Tengah	Tidak Intervensi/Standar Ganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran demokrasi</li> <li>• HAM</li> </ul>

Sumber: Diolah dari *Soft Power and US Foreign Policy* oleh Inderjeet Parmar & Michael Cox (2010) dan *A Concise History of US Foreign Policy* oleh Joyce P. Kaufman (2010).

Berdasarkan penjelasan dari model aktor rasional, dapat dijelaskan bahwa Amerika Serikat mengambil pilihan untuk memilih bersikap standar ganda dalam menanggapi kasus kudeta militer di Mesir. Hal ini disebabkan oleh pengaruh keadaan dan kondisi dari aktor yang membuat keputusan dalam menanggapi masalah tersebut. Amerika Serikat dihadapkan pada dilema dalam masalah ini karena beberapa faktor kondisi di kawasan Timur tengah sebelumnya yang melibatkan Amerika Serikat dan keadaan sekutu-sekutu Amerika Serikat yang banyak menghendaki kudeta militer di Mesir tercipta di kawasan Timur Tengah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dan dikumpulkan melalui beberapa studi literatur dan analisis dokumen seperti: buku, artikel, jurnal, laporan dan berbagai media yang terkait dengan penelitian ini. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode eksplanatif untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri AS: Realisme ke Liberalisme

Alasan peneliti mengambil teori modal aktor rasional dalam membedah masalah yang ada dalam penelitian ini juga didukung dengan perubahan (*change*) di dalam aktor yang akan memutuskan politik luar negeri di AS itu sendiri. Teori ini juga mengakomodir bahwa setiap politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara memiliki fase yang disebut dengan fase *change* dan *continuity*. Holsti berpendapat (Holsti, 1997:5), kedua fase ini dapat diteliti melalui beberapa analisis. Yang pertama yakni analisis dari pandangan seorang pemimpin dan para pemilih pemimpin tersebut. Kedua, sikap dalam menanggapi struktur isu-isu politik luar negeri, isu-isu domestik, serta hubungan antara isu-isu domestik dan internasional. Ketiga, menelaah korelasi sosio-demografis antara isu-isu domestik dan internasional. Di Amerika sendiri ketiga analisis tersebut dapat digunakan untuk menelaah *change* dan *continuity* dalam implementasi politik luar negerinya. Namun, secara keseluruhan, politik luar negeri AS selalu memiliki pengaruh yang besar terhadap isu-isu global. Hal inilah yang membuat implementasi politik luar negeri AS memiliki banyak pilihan dan dilematis. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh pertentangan dan penyeimbang dari opini publik domestik dengan keadaan kontestasi di dalam dunia internasional, kepentingan politik dengan kepentingan nasional jangka panjang, politik isolasionisme dengan sifat kefanatikan, militer dengan konstruksi keterlibatan internasional, dan yang terakhir ialah realisme dengan liberalisme (Holsti, 1997: 5).

Setiap presiden dan jajaran pemerintahan AS yang terpilih memiliki gaya masing-masing dalam mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah. Terlebih lagi, gaya kepemimpinan masing-masing presiden tersebut dipengaruhi oleh latar belakang partai politik yang mengusung sang calon presiden.

Dua partai besar yang mendominasi AS yakni Republik dan Demokrat memiliki cara yang berbeda dalam mempertahankan hegemoni AS di Timur Tengah. Kebijakan Bush yang berasal dari Partai Republik dalam mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah memang cenderung condong pada aktivitas realisme. Bush yang selalu menggunakan kekuatan militer di Timur Tengah untuk mempertahankan dominasi dan kepentingan ekonominya memiliki cerita tersendiri dalam meningkatkan gerakan radikalisme Islam di Timur Tengah, sedangkan orientasi politik luar negeri di bawah Presiden Barack Obama lebih condong ke liberalisme.

Secara umum, kepentingan Bush di kawasan Timur Tengah merupakan kepentingan strategis. Namun, secara khusus, kepentingan itu berubah sejalan dengan peristiwa 9/11 dan kegagalan Bush menemukan senjata pemusnah massal setelah menginvasi Irak. Perubahan kebijakan ini dikenal dengan istilah *Bush Doctrine* yang menghasilkan kebijakan *counter-terrorism* (Bowman, 2008: 79). Bush menekankan kerja sama *political-security partnership* dengan beberapa negara di Timur Tengah. Hal itu disebabkan oleh politik luar negeri Bush yang dikenal dengan "*war on terrorism*". Bush melihat ancaman teroris sama dengan ancaman Uni Soviet pada saat Perang Dingin dan NAZI saat Perang Dunia II (Bowman, 2008: 77)/ Dengan demikian, kebijakan untuk mempromosikan demokrasi ke Timur Tengah merupakan jalan untuk membuka ekonomi global dan sebagai bentuk respon terhadap peristiwa 9/11. Demokrasi juga dapat membawa kebebasan berpolitik dan melawan Islam radikal. *Islamic political movement* merupakan suatu ancaman yang baru untuk mewujudkan demokrasi di Timur Tengah, sehingga Bush menolak segala bentuk *Islamic political movement* karena memicu meningkatkan tindakan radikalisme di Timur Tengah dengan mengambil contoh kasus HAMAS di Gaza, Palestina. Secara sederhana, Bush

menganggap *Islamic political movement* sebagai *clash interest* AS di Timur Tengah.

Bowman, seorang anggota dewan dari *Foreign Relations International Affairs* (2007-2008), memiliki tanggapan berbeda dalam melihat kebijakan Bush. Kehadiran militer AS di Timur Tengah memiliki faktor terpenting dalam meningkatnya gerakan radikalisme Islam dan meletakkan AS itu sendiri sebagai sasaran empuk dan musuh abadi bagi kelompok terorisme (Bowman, 2008: 79). Keberadaan militer AS yang dominan pada masa pemerintahan Bush di Timur Tengah memang dinilai kontraproduktif dari tujuan utama AS di wilayah tersebut. Minyak merupakan alasan AS dalam mengamankan kepentingannya di Timur Tengah terutama mengamankan akses minyak ke Teluk Persia yang merupakan kebutuhan vital jangka panjang. Menurut *Energy Information Agency* (EIA) konsumsi energi dunia pada tahun 2003 hingga 2030 akan meningkat sebesar 71%, sedangkan kebutuhan AS akan minyak dunia ditahun 2005 hingga 2030 akan meningkat berkisar 23-39%. Pemerintah AS sendiri mengandalkan impor minyak sebesar 60% untuk kebutuhan dalam negerinya, dan sesuai dengan perkiraan EIA maka impor minyak AS di tahun 2030 akan meningkat 62% (Bowman, 2008: 79). Oleh karena itu, persediaan minyak bumi di Teluk Persia akan sangat membantu untuk memenuhi kepentingan AS akan sumber daya energi di masa depan. Kawasan Teluk Persia itu sendiri menyumbang setidaknya 27% dari kebutuhan minyak dunia pada tahun 2003 dan menyimpang 57% minyak bumi serta 41% cadangan gas alam. Produksi dari minyak dari kawasan ini juga akan diperkirakan meningkat 33% pada tahun 2020 sesuai dengan kepentingan global (Bowman, 2008: 79). AS harus memanfaatkan politik luar negerinya untuk menguasai sumber energi tersebut, termasuk mengamankan Selat Hormuz dan Terusan Suez. Jika tidak, konsekuensi ekonomi dan politik akan menjauhkan AS dari hal itu. Selain itu, ancaman terorisme

yang diakibatkan oleh meningkatkan aktivitas radikalisasi dan proliferasi senjata nuklir seperti yang dilakukan oleh Iran juga menjadi pertimbangan khusus AS untuk menggunakan pendekatan militer dalam menjaga kepentingannya.

Tidak heran jika dimasa pemerintahan Bush jumlah angkatan bersenjata meningkat pesat untuk diletakkan di *basecamp* AS yang ada di Timur Tengah. Hal ini didukung juga dengan peristiwa 11/9 (tahun 2001) dan invasi AS ke Irak (2003). Jumlah militer bersenjata AS dari berbagai angkatan, baik udara, darat, maupun laut, mencapai 220.000 personel dan ditempatkan di beberapa negara sekutu AS di Timur Tengah. Jumlahnya meningkat tiga kali lipat pada tahun 2007, melebihi jumlah tentara yang pernah ditempatkan AS di Timur Tengah tahun 1989. Secara umum, garispolitik luar negeri dibawah Bush (Republik) ialah akses ke minyak Teluk Persia, *counter-proliferation*, dan *counter-terrorism* (Bowman, 2008: 79).

Barrack Obama yang berasal dari partai Demokrat lebih mempertimbangkan penggunaan militer dalam mengedepankan hegemoninya di Timur Tengah. Salah satu langkah kebijakan yang dikenal di era pemerintahan Barrack Obama dikenal dengan istilah *scrutinizing policy*, yang menurut Nye kebijakan ini lebih mengedepankan penggunaan *softpower* dalam mengembangkan hubungan antara kekuatan AS dan politik luar negeri (Parmar & Cox, 2010:16). Obama lebih mengedepankan aspek liberalisme dalam menjaga hegemoninya di Timur Tengah dan mengubah arah politik luar negeri yang akan diterapkan oleh AS terhadap kawasan Timur Tengah. Selain itu, Obama lebih memandang Islam sebagai *The Muslim World* (Bowman, 2008:79). Dalam pandangan Obama, Islam memiliki cara tersendiri untuk menegakkan keadilan bahkan demokrasi di Timur Tengah. Pandangan Barat yang selama ini telah memojokkan Islam pasca-peristiwa 9/11 harus diubah. Hal ini membuat kebijakan Obama terhadap *Islamic political*

*movement* sebagai gerakan politik Islam yang moderat tetap memerlukan beberapa pendekatan dengan kelompok *Islamic political movement* untuk menentukan posisi AS di Timur Tengah. Hal itulah yang diupayakan oleh AS di Timur Tengah terhadap kelompok-kelompok Islam, termasuk gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Perubahan kebijakan juga dibuktikan oleh Obama dengan menarik seluruh pasukan AS di Irak pada akhir tahun 2011. Pendekatan realisme yang selama ini digunakan oleh AS di Timur Tengah, mulai diubah dengan pendekatan liberalisme yang mengedepankan penegakan demokrasi sebagai agenda terpenting politik luar negeri AS di Timur Tengah, untuk mempertahankan dan menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah agar tetap dalam kendali AS. Namun, cara yang digunakan melalui pendekatan yang digunakan oleh AS melalui pendekatan liberalisme ini juga tidak berjalan dengan lancar. AS dalam upaya penegakan nilai demokrasinya di kawasan Timur Tengah dihadapkan dengan apa yang dibawa oleh fenomena *Arab Spring*,

yakni *Islamic political movement* seperti yang diungkapkan oleh Jeremy M. Sharp (Sharp, 2006: 34). Berbagai partai politik yang berlandaskan Islam mulai meningkatkan aktivitas dan dominasinya di kawasan tersebut. Fenomena *Arab Spring* seolah menjadi jembatan untuk membangkitkan kembali *Islamic political movement*. Selain itu, kehadiran gerakan yang mengatasnamakan *non-violence Islamist* juga memberikan kesulitan dan tidak bisa dibendung oleh AS sehingga mengaburkan posisi AS di Timur Tengah. Hal itu menimbulkan kesulitan tersendiri bagi AS dalam melancarkan agenda luar negerinya di Timur Tengah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Dimitris, bahwa tiga tantangan yang paling utama bagi politik luar negeri AS saat ini ialah kebangkitan Tiongkok yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, bangkitnya paham Islam dalam politik (khususnya paham Islam radikal) yang dapat mengganggu stabilitas perdamaian, dan demokrasi serta penegakan HAM secara efektif dan efisien di seluruh dunia (Sharp, 2006: 34).

**Tabel 2****Doktrin Presidensial Amerika Serikat Pasca-Perang Dunia II**

<b>Tahun</b>	<b>Doktrin Presidensial</b>	<b>Deskripsi</b>
1947	Doktrin Truman	Komitmen AS untuk mendukung pemerintah negara lain dalam menghadapi gerakan subversi internal maupun eksternal
1957	Doktrin Eisenhower	Mendeklarasikan Timur Tengah sebagai kawasan vital bagi AS
1969	Doktrin Nixon	Mengalihkan keterlibatan AS ke Asia untuk membantu sekutu dalam menangkali ideologi Komunisme di negara-negara sekutu.
1985	Doktrin Reagan	AS menjanjikan negara sekutu untuk melawan Komunisme dengan membuat kelompok pemberontak ( <i>insurgent or freedom fighters</i> )
1994	Doktrin Clinton	Identifikasi dan menyebarluaskan paham demokrasi melalui kebijakan luar negeri AS
2002	Doktrin Bush	Pertahanan preventif terhadap gerakan Terorisme Global sebagai strategi utama AS
2009	Doktrin Obama	Era baru dalam membangun hubungan kerjasama berdasarkan kepentingan dan kehormatan bersama

Sumber: Diolah dari *US Foreign Policy: The Paradox of World Power (3<sup>rd</sup> ed.)* oleh Steven W. Hook (2001) dan *Soft Power and US foreign Policy* oleh Inderjeet Parmar & Michael Cox (2010).

### **Kekhawatiran Amerika Serikat Terhadap Kebangkitan Ikhwanul Muslimin**

Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu aktor yang memiliki konsekuensi dan ancaman potensial setelah fenomena *Arab Spring* dan jatuhnya rezim Husni Mubarak. Kemenangan IM juga akan mendeskripsikan posisi politik di Mesir kedepannya dan posisi Mesir di dalam kawasan Timur Tengah. Kemenangan IM sebagai *political Islam* pasca *Arab Spring* akan menjadi kekhawatiran bagi AS yang membawa landasan Islam pada implementasi kepentingan nasional Mesir dan kepentingan martabat Muslim dunia untuk melawan pendudukan oleh asing (Barat) serta kolaborator domestik yang mereka buat.

Dampak peristiwa *Arab Spring* seolah-olah menjelaskan titik kulminasi perdebatan panjang di dunia akademisi yang mempertanyakan apakah Islam sesuai

dengan demokrasi. Menurut beberapa pandangan akademisi terhadap Islam, menyebutkan bahwa Islam bukan suatu agama yang dekat dengan *governing*, sehingga tidak akan sesuai jika dipasangkan dengan demokrasi. Namun, beberapa akademisi seperti Eid Mohammed dan Bessma Momani, menyebutkan bahwa Islam bukan hanya suatu agama, melainkan sistem yang mengatur hukum, politik, ekonomi dan komponen sosial lainnya. *Political Islam* mulai bangkit di Timur Tengah sejalan dengan nilai demokrasi yang muncul akibat peristiwa *Arab Spring*. Contohnya, kemenangan Hizbullah di parlemen Lebanon sebesar 18% (2005), IM di parlemen Mesir sebesar 20% (2005), dan kemenangan Hamas di Palestina (2006). Hal ini menunjukkan bahwa *political Islam* berkembang semakin agresif dan menjadi ideologi dalam menentang kepentingan

Barat (Vidino, 2014: 6).

Peristiwa *Arab Spring* telah menunjukkan ke dunia bahwa *political Islam* seperti IM di Mesir mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Kebangkitan *political Islam* pasca-peristiwa *Arab Spring* bukan suatu fenomena kebangkitan Islam. Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan kepada dunia luar (Barat) atas kecerobohan pihak Barat yang tidak mampu memprediksi dampak kebijakan *global war in terror* dan penegakan demokrasi yang digaungkan Barat, khususnya AS, yang telah memupuk dan membangkitkan radikalisme sehingga memberi pengaruh besar terhadap munculnya *political Islam*.

IM juga dikenal sebagai gerakan *Islamist National Resistance* yang merestorasi keadaan lokal untuk keluar dari pengaruh dan dominasi Barat yang selama ini selalu merugikan negara dunia ketiga, terutama di Mesir. IM juga memiliki kelebihan dari gerakan Islam lainnya, sehingga memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi AS untuk menelaah gerakan IM baik sebelum peristiwa *Arab Spring* maupun sesudahnya.

### **Dimensi Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap *Political Islam*: Eksistensi Ikhwanul Muslimin di Mesir**

Politik luar negeri AS selalu dipengaruhi oleh konteks sejarah dan aktor utama yang memegang kekuasaan dalam menentukan politik luar negeri AS itu sendiri. Konteks sejarah dan aktor itulah yang bisa menunjukkan apakah politik luar negeri AS berubah menuju sesuatu yang “baru” atau meneruskan politik luar negeri yang telah ada. Kebanyakan akademisi AS yang mengkaji politik luar negeri mulai menelaah hal tersebut dengan pertanyaan *internationalism* atau *engagement*, serta dari sudut pandang lain, yakni *isolationism* atau *unilateralism* (Kauman, 2010: 4). Perubahan (*change*) dalam politik luar negeri AS dapat tercermin dari kepentingan terbaru dari negara tersebut. Dengan kata lain, politik luar negeri AS yang baru harus

memprioritaskan hubungan dengan aktor yang berada baik di dalam maupun luar negeri, aktor *non-state*, organisasi internasional. Politik luar negeri antara Presiden George Bush dan Barrack Obama dapat dikaji melalui aspek perubahan (*change*) dalam menentukan politik luar negeri, terlebih lagi pada kepentingan AS di Timur Tengah dalam pandangan *Islamic World*. Aspek *change* dan *continuity* yang diperlihatkan oleh AS dalam memandang Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan *political Islam* berpengaruh dalam mengedepankan kepentingan AS di kawasan Timur Tengah sangat perlu diperhatikan.

Beberapa akademisi seperti Fawaz Gergez mencoba menganalisa politik luar negeri AS terhadap Islam, khususnya *political Islam*. Analisa dimulai dari apakah *political Islam* bertentangan dengan kultur AS (Barat) atau hanya di tataran kepentingan AS. Gergez yang memulai analisisnya dengan pertanyaan *America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interest?* membenarkan bahwa secara luas kultur Islam membuat beberapa kebijakan AS di Timur Tengah mengalami kendala dalam proses perumusan kebijakan. Namun, secara komprehensif, pertentangan AS bukan terhadap Islam, melainkan pada kepentingan (Vidino, 2013: 6).

Analisis selanjutnya dilakukan oleh Marie de Ceu Pinto yang setuju akan adanya *clash interest* antara Barat dan *political Islam*. Analisis yang dilakukannya berdasarkan studi terdahulu yang pernah dikaji oleh Fuller dan Lesser dengan melihat keganjilan antara Barat dan Islam secara garis besar tidak didasari atas masalah teologi, melainkan masalah politik, ekonomi, strategi psikologikal, dan faktor budaya (Vidino, 2013: 8).

Pada intinya, kepentingan AS terhadap Timur Tengah ialah dukungan terhadap Israel dan proteksi terhadap penguasaan sumber energi di Timur Tengah. Namun, dalam implementasinya, Bush menolak mengakui gerakan *political Islam*. Sebaliknya, Obama memiliki pendekatan

yang berbeda dalam melihat gerakan *political Islam*. Oleh karena itu, analisis *interest-based* sering gagal menjelaskan mengapa masing-masing presiden memiliki kepentingan yang sama namun dalam cara-cara yang berbeda.

Hal itulah yang terjadi di Mesir. Kemenangan IM pada pemilu pertama Mesir dalam memilih anggota parlemen pasca-kejatuhan rezim Husni Mubarak dan *Arab Spring* (2011) menjadi tantangan tersendiri bagi AS dalam melancarkan agenda politik luar negerinya di Timur Tengah. Kemenangan IM di parlemen tersebut juga mengantarkan Muhammad Mursi sebagai pemenang pemilu Presiden pada 2012. Dengan berkuasanya IM di Mesir tidak serta-merta mengembalikan keadaan negara tersebut kondusif pascakudeta militer yang menjatuhkan rezim Husni Mubarak. Kepemimpinan Mursi juga banyak dikritisi oleh kaum sekuler yang ada di Mesir, sehingga peristiwa ini berujung pada konflik sipil antara kaum sekuler dan pendukung pemerintahan serta konflik sipil dan militer yang menyebabkan banyaknya demonstran dan simpatisan dari kalangan sipil yang terbunuh serta mengindikasikan pelanggaran HAM. Kaum liberal di Mesir menganggap kebijakan yang dikeluarkan Mursi tidak memenuhi hak-hak individu, kebebasan berpendapat dan sipil. Oleh karena itu, perpecahan dan konflik antara sesama elit dan pendukung tidak terelakkan. Hal inilah yang mengakibatkan konflik bersifat seperti kanker dalam tubuh politik. Fenomena tersebut yang dialami Mesir pada saat itu. Kecenderungan akan perpecahan internal dalam bentuk revolusionis internasional inilah yang menyeret kekuatan-kekuatan dan ideologi ke dalam politik internasional (Burchill & Linklater, 1996: 125). Fenomena ini bisa dideskripsikan melalui peranan *Islamic political movement*, khususnya gerakan IM di Mesir.

### **Posisi Amerika Serikat Dan Negara-Negara Sekutunya Di Timur Tengah Terhadap Kudeta Mesir**

Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda dalam merespon kudeta di Mesir 2013. Respon yang diambil oleh AS itu sendiri didasari oleh hubungan AS dan Mesir yang telah terjalin sejak dahulu. AS menghormati Mesir sebagai negara yang berdaulat dan sumber peradaban di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Mesir dianggap oleh AS memiliki peran penting dalam upaya penegakan perdamaian di kawasan tersebut. Beberapa latar belakang tersebut membuat AS dan Mesir memiliki hubungan yang telah tertempa sejak dahulu dan memiliki skala panjang yang bersifat terikat. Obama, setelah berdiskusi dengan Penasehat Keamanan Nasional AS (*National Security Team*) pada tanggal 15 Agustus 2013, menyampaikan tanggapannya perihal masalah tersebut melalui *Federal News Service*, bahwa AS telah menetapkan beberapa respon yang akan diambil berdasarkan pengamatan dari beberapa peristiwa di Mesir yang terjadi pra dan pascakudeta (White House Office Press Secretary, 2013: 1).

Lebih dari dua tahun yang lalu, AS memahami keinginan rakyat Mesir untuk melakukan perubahan dengan melakukan aksi turun ke jalan untuk membela hak-hak mereka dan menuntut pemerintah agar responsif terhadap aspirasi rakyat dalam memberikan kebebasan berpolitik dan kemajuan ekonomi. AS pada saat itu merespon peristiwa tersebut dengan menyatakan bahwa perubahan tidak akan datang dengan cepat atau mudah, tapi AS selalu mencoba menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip yang dimilikinya, yakni prinsip non-kekerasan, menghormati hak-hak universal, dan proses reformasi politik serta ekonomi. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, AS selalu dihadapkan tidak hanya dengan panduan prinsip-prinsip yang diadopsinya, namun juga oleh kepentingan. Secara keseluruhan respon **pertama** yang akan diambil oleh AS

yakni yang berkaitan erat dengan kepentingannya. Obama memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dengan Mesir, yakni menjaga agar Mesir tetap berdamai dengan Israel, menjaga jalur perdagangan minyak yang melewati Terusan Suez, dan memastikan kelompok radikal Islam tidak meluas dan membuat kerusakan atas nama anti-Barat. AS memastikan Mesir hanya menjalani transisi untuk mengembalikan proses demokrasi, bukan memboikot salah satu kelompok politik namun bekerjasama dengan pihak militer yang membunuh pendukung Mursi tanpa mendeklarasikan militer terlibat dalam peristiwa itu (Kalil, 2013: 1). Sikap ini seolah melunturkan nilai liberal yang terkandung dalam politik luar negeri AS dan menempatkan AS mengambil posisi standar ganda. Tanggapan AS terhadap peristiwa kudeta Mesir cukup membingungkan. Di satu sisi, AS menyatakan keprihatinan. Namun, di sisi lain, AS menghargai kompleksitas situasi yang terjadi di Mesir. Muhammad Mursi yang terpilih sebagai Presiden dalam pemilu yang demokratis, dalam pandangan AS telah menjalankan pemerintahan secara tidak inklusif dan tidak menghormati pandangan semua rakyat Mesir. AS menganggap suara perubahan banyak dikemukakan oleh kebanyakan rakyat Mesir meskipun seruan perubahan itu masih dalam perdebatan di Mesir itu sendiri. Respon yang dianggap sangat kontroversi dari Gedung Putih ialah keberadaan dan intervensi militer Mesir terhadap pemerintahan Mursi yang dinilai oleh AS sebagai jalan untuk menyelesaikan perbedaan politik dan membuka jalan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi serta kembali ke jalur demokrasi.

Respon **kedua** AS terhadap masalah kudeta Mesir menyebutkan bahwa pemerintahan Mursi belum bisa dikatakan berdiri secara demokrasi seutuhnya. Hal ini senada dengan pernyataan Obama,

*"Democracy is not just about general election, it is also about how you are working with opposition, how you treat the*

*sentence voices, and how you treat minority groups"* (Kalil, 2013: 1).

Dalam melihat kudeta Mesir, AS lebih menyalahkan kepemimpinan Mursi yang tidak bisa mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. AS juga beranggapan bahwa demonstrasi yang berujung pada konflik sipil diakibatkan oleh kelompok rakyat yang pro-pemerintahan (pendukung Mursi). Namun, AS juga tidak menampik bahwa kekerasan terjadi karena aksi provokasi dari kedua belah pihak, yakni para pendukung Mursi dan pihak yang berada di barisan oposisi, juga penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak militer.

Respon **ketiga** yakni AS, melalui pernyataan yang disampaikan oleh Obama, mengutuk keras tindakan yang telah diambil oleh pemerintah dan militer Mesir. Namun, di sisi lain, AS menganggap hal tersebut sebagai suatu transisi menuju ke arah yang lebih demokratis dengan cara yang lebih sulit dan itu juga dirasakan juga oleh bangsa dan negara lainnya, tidak terkecuali AS itu sendiri. Kekerasan yang menimpa warga sipil merupakan pelanggaran atas kebebasan dalam mendukung hak-hak universal. AS mendukung bahwa kebebasan untuk mengemukakan hak-hak universal penting untuk penegakan martabat manusia, termasuk hak untuk melakukan protes secara damai. Darurat militer yang terjadi di Mesir merupakan suatu tindakan penyangkalan hak-hak warga Mesir. Pemerintah AS juga menyayangkan bahwa tindakan aparat militer Mesir lebih mengutamakan keamanan dari pada kebebasan individu sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuh. Pernyataan yang sarat standar ganda ini diperkuat dengannya adanya ucapan bela sungkawa dari pemerintah AS tanpa melihat ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. AS melalui pernyataan tersebut hanya menggaungkan agar masalah ini cepat diselesaikan agar tidak merambat jauh ke aspek sosial dan ekonomi di Mesir.

AS juga memutuskan untuk tidak terlibat dalam konflik yang melibatkan sipil-militer yang terjadi di Mesir karena mempertimbangkan hubungan Mesir dan AS yang telah terjalin selama ini. Selain itu, kepentingan nasional AS terhadap Mesir dan kawasan Timur Tengah juga akan berpengaruh terhadap konstelasi politik internasional ke depannya. Hal itulah yang membuat AS mendukung sepenuhnya tindakan transisi yang akan dilakukan di Mesir tanpa harus melibatkan korban jiwa yang lebih banyak. Obama melalui tim keamanan nasional AS juga akan menilai implikasi dari tindakan yang diambil oleh AS sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan luar negeri terhadap hubungan AS dan Mesir berikutnya.

Respon AS terhadap kudeta Mesir terkesan timpang dengan apa yang menjadi prinsip AS selama ini, yakni kebebasan dan menghargai hak-hak universal. Kudeta Mesir yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuh seolah dipandang sebagai suatu proses bagi AS untuk mengembalikan demokrasi di negara itu. Rakyat Mesir berhak lebih baik ke depannya dari pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Mursi. Penegakan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas merupakan yang dianggap gagal oleh AS terhadap pemerintahan Mursi. Proses kudeta merupakan bagian dari transisi untuk mengejar reformasi terhadap transparansi konsitusi dalam pemilu yang dianggap tidak ada sebelumnya pada pemerintahan Mursi.

Kondisi damai, demokratis, dan kondisi rakyat yang sejahtera merupakan kepentingan AS. Untuk mencapai hal tersebut, Mesir harus melewati banyak tantangan dan butuh banyak waktu yang tidak bisa diukur dengan hitungan bulan, tahun, melainkan generasi. Namun, hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh AS. Masa depan Mesir berada di tangan rakyat Mesir itu sendiri. Inilah yang menjadi respon **keempat** AS dalam melihat kudeta Mesir. AS juga tidak berada di pihak manapun,

walaupun salah satu pihak, yakni pihak pendukung Mursi, menyalahkan keterlibatan AS dalam proses kudeta ini. AS akan selalu membangun hubungan dengan pihak mana saja yang berkuasa di Mesir, selama pondasi keadilan, damai, dan prinsip non-kekerasan tetap dijaga.

Barrack Obama dalam kunjungannya ke Mesir pada tahun 2009 pernah menyinggung bahwa penegakan demokrasi merupakan suatu keniscayaan yang harus tercapai di kawasan Timur Tengah, dan hal tersebut dapat dimulai dari Mesir. Mesir sebagai jantung Timur Tengah dapat memberikan dampak yang bagus bagi penyebaran demokrasi di kawasan tersebut. Pernyataan Obama dalam kunjungan tersebut menekankan pada nilai demokrasi yang bermakna lebih dari sekedar dipilih:

*"We will welcome all elected, peaceful governments-provided they govern with respect for all their people," Obama explained. "Elections alone do not make true democracy"*(Crowly, 2015: 1).

Empat tahun kemudian, pernyataan Obama tersebut seakan muncul ke permukaan sejalan dengan respon Gedung Putih terhadap intervensi militer terhadap kudeta pemerintahan Mursi. Pernyataan resmi dari Gedung Putih memang terkesan menghindari kata "kudeta" dan menekankan pada legitimasi presiden terpilih di Mesir sebagai gejala dari peristiwa *Arab Spring*. Hal senada diungkapkan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki yang menyatakan demokratisasi tidak hanya sekedar mengumpulkan suara pemilih terbanyak (Crowly, 2015: 1).

Pernyataan ini menambah deretan bukti bahwa Gedung Putih seolah buta dengan peristiwa kudeta yang terjadi di Mesir. Pilihan tindakan seperti ini sengaja diambil oleh AS, yakni dengan menyampaikan beberapa pernyataan yang penuh retorika seolah bukan peristiwa "kudeta" yang terjadi di Mesir, melainkan jalan menuju demokrasi yang akan ditempuh oleh sebagian besar rakyat Mesir. Selain itu,

respon AS juga dipengaruhi oleh tindakan sekutu-sekutu AS di Timur Tengah yang menganggap bahwa keberadaan *political Islam* seperti IM di Mesir dapat menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

## KESIMPULAN

Kudeta Mesir 2013 telah memperlihatkan bentuk dari standar ganda politik luar negeri AS. AS selama ini dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi seolah melanggar nilai demokrasi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Kauman, Joyce P. (2010). *A Concise History of US Foreign Policy*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc: USA.
- Mohammed, Eid & Bessma Momani. (2014). The Muslim Brotherhood: Between Democracy, Ideology and Distrust. *Sociology of Islam*, (2), 196-212. Koninklijke Brill NV, Leiden.
- Parmar, Inderjeer and Michael Cox. (2010). *Soft Power And US Foreign Policy: Theoretical, Historical, and Contemporary Perspectives*. New York: Routledge.
- Setiawati, Siti Muti'ah, dkk. (2004). *Irak di Bawah Kekuasaan Amerika, Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia*. Yogyakarta: PPMTT, IHI-FISIPOL UGM.
- Smith, Steve. (2008). *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (2nd edition)*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Vidino, Lorenzo. (2013). *The West and The Muslim Brotherhood After The Arab Spring*. Al Mesbar Studies & Research Center and Foreign Policy Institute.

### Internet

- AFP. (2013). "Attack on pro-Morsi rally kills 16." Diakses dari <http://www.bangkokpost.com/breakingnews/358099/attack-on-pro-morsi-rally-kills-16> pada 27 Desember 2014.

Kepentingan AS yang terlalu luas dan hegemoni AS di Mesir membuat AS memilih untuk bersikap standar ganda. Benturan kepentingan antara menegakkan demokrasi dan menjaga kepentingan geopolitik dan geoekonomi di Mesir membuat AS harus memilih untuk bersikap standar ganda. Tanggapan AS terhadap peristiwa kudeta Mesir cukup membingungkan. Di satu sisi, AS menyatakan keprihatinan, sementara di sisi lain menghargai kompleksitas situasi yang terjadi di Mesir.

- AFP. (2013). "Gun attack on Cairo pro-Morsi rally kills 16." Diakses dari <http://dawn.com/news/1022322/gun-attack-on-cairo-pro-morsi-rally-kills-16-ministry> (pada 27 Desember 2014).
- Barrack Obama Statement on Egypt Coup. (2013, 7 Maret). Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=-jRkM0A3oaM> (pada 26 November 2015).
- Kalil, Ashraf. (2013, 9 Juli). "Egypt's Way Forward: New Transition Plan Draws Immediate Fire." Diakses dari <http://world.time.com/2013/07/09/egypt-way-forward-new-transition-plan-draws-immediate-fire/> (pada 7 Januari 2016).
- Laub, Karin. (2011). "Libyan estimate: At least 30,000 died in the war". *Associated Press*. Diakses dari <http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/09/08/international/i004907D85.DTL> (pada 25 Desember 2014).
- Michael Crowley. (July 2, 2013, 2 Juli). "With Egypt in Crisis, Is Obama Playing it too Safe?" Diakses dari <http://swampland.time.com/2013/07/02/with-egypt-in-crisis-is-obama-playing-it-too-safe/> (pada 26 November 2015).
- Pelletreau, Robert H. (2011). "Transformation in the Middle East: Comparing the Uprisings in Tunisia, Egypt and Bahrain". *Foreign Affairs*.

Diakses dari <http://www.foreignaffairs.com/articles/67546/robert-h-pelle-treau/transformation-in-the-middle-east> (pada 25 Desember 2014).

Wedeman Ben, Reza Sayah and Matt Smith. (2013, 28 Juni). "Morsy out in Egypt coup." *CNN*. Diakses dari [http://www.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egyptprotests/index.html?hpt=hp\\_t1](http://www.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egyptprotests/index.html?hpt=hp_t1) (pada 27 Desember 2014).

Weiss, Thomas G. (2011). "The Responsibility to Protect: Challenges and Opportunities in Light of The Libyan

Intervention." *London: UK universities of Oxford, Leicester and Aberystwyth*.

Diakses dari <http://www.google.com/url?q=http://www.e-ir.info/wp-content/uploads/R2P.pdf&sa> (pada 25 Desember 2014).

Whitehouse Office Press Secretary. 2013. "Remarks President Situation in Egypt."

Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/15/remarks-president-situation-egypt> (pada tanggal 4 Januari 2016).